

# KETIMPANGAN PENDAPATAN PERKAPITA DI PULAU SUMATERA TAHUN 2003-2013

Oleh:

**Utari Antika S**

**Pembimbing : Mardiana dan Taryono**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail : [utari.antika@yahoo.com](mailto:utari.antika@yahoo.com)*

*Disparities Income Per Capita In Sumatra Year 2003-2013*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the disparities income per capita in Sumatra year 2003-2013. Where will the results of this study can be seen for what disparities. In addition to knowing imbalance occurs between regions or inter-region. The analysis used in this study is a qualitative analysis based on the theory as well as the opinions of experts who are already applicable to the public. The formula used in this research that Williamson index and Theil entropy index. From the calculation results obtained during the observation period (2003-2013) to the island of Sumatra as follows: the average disparities income per capita in Sumatra by using IW during the observation period (2003 -2013) are 0,00764. Disparities average income per capita by Entropi Theil index for within and between Sumatra during the observation period (2003-2013) are 0,35634 dan 0,08211. By using the index calculation Williamson the highest disparities in 2004. While using the Theil entropy index calculation within province is greater than between region.*

*Keywords: income per capita, population, income per capita disparities, Williamson index, Theil entropy index*

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (*growth*) telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejumlah prestasi pun banyak yang diraih (Damiana dan Sirojuzilam, 2013). Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan laju pertumbuhan dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pendapatan. Masalah besar yang dihadapi negara sedang

berkembang adalah ketimpangan (*disparitas*) pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Ketimpangan pendapatan antar daerah tidak dapat dihindari akibat tidak ada efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang (Gama,

2007). Beragamnya ekonomi antar daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbedaan laju pertumbuhan penduduk, sumber daya manusia, sumber daya alam, pengangguran serta adanya kecenderungan penanaman modal yang tidak merata sehingga hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan penduduk daerah menjadi tidak seimbang (Apriliani dan Bendesa, 2013).

Ketertinggalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih disebabkan belum digunakannya secara optimal sumberdaya yang ada di daerah tersebut dan masih minimnya sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan kata lain bahwa masyarakat atau daerah yang memiliki faktor produksi yang rendah kurang mendapat kesempatan sehingga tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari perbedaan dalam distribusi pendapatan yang cukup besar. (Mardiana dan Basri, 2012). PDRB perkapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB pada tingkat nasional) yang tinggi seperti yang telah ditempuh dalam beberapa dasawarsa yang lalu, telah

memperlihatkan keberhasilan secara memuaskan di berbagai bidang dan sektor pembangunan, yang diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang memperlihatkan peningkatan secara terus menerus. Demikian pula pendapatan perkapita, kesempatan kerja, ekspor (baik volume maupun penerimaan devisa), struktur perekonomian menjadi lebih kokoh yang ditunjuk dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor perindustrian dalam PDB. Ternyata pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal).

Kesenjangan atau ketimpangan antar yang kaya dan yang miskin telah menimbulkan konsep “Garis Kemiskinan” (*poverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Mereka dikatakan berada di garis kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan tajam. Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi itu dapat di atasi dengan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan keseluruhan lapisan masyarakat dan keseluruhan wilayah (Adisasmita, 2005:10).

Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan

Indonesia. Luas pulau ini sekitar 480.793,28 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pulau ini berkisar 53.430.321 jiwa. Pulau Sumatera terbagi atas sepuluh Provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Menurut Bank Indonesia wilayah Sumatera di bagi atas tiga bagian yaitu:

1. Sumbagut ( Aceh, Sumatera Utara )
2. Sumbagteng ( Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau )
3. Sumbagsel (Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung )

Sumatera adalah pulau yang subur dan kaya dengan berbagai sumber alam: minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, timah, bijih besi dan masih banyak lagi. Jumlah penduduk pulau Sumatera juga ideal dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) angka PRDB menurut lapangan usaha non migas atas dasar harga konstan 2000 selalu meningkat setiap tahunnya. Dari sepuluh provinsi yang ada PDRB tertinggi selalu di Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp. 141.768,86 miliar pada tahun 2013. Sedangkan Bengkulu selalu memperoleh PDRB terendah dari sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera yakni Rp. 10.052,31 miliar pada tahun 2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan perkapita di Pulau Sumatera tahun 2003-2013. Untuk mengetahui ketimpangan antara

wilayah dan di dalam wilayah. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.

## **TELAAH PUSTAKA**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) adalah merupakan hasil bagi dari nilai total PDRB suatu wilayah terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah maka semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya.

Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada kurun waktu tertentu.

Ketika pendapatan rata-rata naik, maka disparitas juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka disparitas akan turun kembali. Penelitian yang telah dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada disparitas antar wilayah di dalam Negara. Williamson menghubungkan disparitas pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah (Rizal,2013).

Dalam Sirojuzilam (2009) banyak pakar mengatakan adanya *trade off* diantara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Fei dan Rains (1964), Kuznets (1966), Adelman dan Moris (1973), menyatakan bahwa disparitas atau ketimpangan pendapatan ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang diindikasikan oleh luas wilayah (negara), sumber daya alam dan kebijakan yang di laksanakan. Dari pendapat di atas, maka pada kesempatan ini akan dikemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah sebagai berikut :

- a. Transportasi
- b. Indeks Pembangunan Manusia
- c. Penduduk
- d. Investasi

Banyaknya masalah yang timbul disuatu wilayah tentu dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Begitupun adanya perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan mempengaruhi nilai pendapatan di daerah tersebut. Sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda.

Menurut Hipotesa Neo-klasik pada permulaan proses pembangunan pada suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah

cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal,2008:105).

## METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yang didasarkan teori-teori serta pendapat-pendapat dari para ahli yang sudah berlaku secara umum. Untuk mendukung analisis kualitatif ini digunakan pula analisis kuantitatif.

Dalam penelitian dipilih koefisien variasi Williamson karena memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan melihat kecenderungan pola ketimpangan di Sumatera pada periode 2003-2012. Ketimpangan ekonomi diukur menggunakan indikator perkembangan PDRB perkapita tahunan sepuluh provinsi yang ada di Sumatera (Yeniwati, 2013). Adapun cara menghitung koefisien variasi Williamson dapat dilakukan dengan cara:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 f_i/n}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

$V_w$  = Koefisien variasi Williamson (Indeks Williamson)

$Y_i$  = PDRB Perkapita masing-masing propinsi di wilayah Pulau Sumatera

$\bar{Y}$  = PDRB Perkapita di Pulau Sumatera.

$f_i$  =Jumlah Penduduk pada masing-masing propinsi di wilayah Pulau Sumatera

$n$  = Jumlah Penduduk di Pulau Sumatera.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto, Ying menggunakan Indeks Entropi Theil. Dengan menggunakan alat analisis Indeks Entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi. Adapun cara menghitung Indeks Entropi Theil dapat dilakukan dengan cara (Ying, 2000 dalam Kuncoro, 2004:134).

$$I(y) = \sum \left( \frac{Y_i}{Y} \right) \log \left( \frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right)$$

T

$$= \sum_{i=1}^u \left( \frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_{i=1}^u \left( \frac{Y_i}{Y} \right) \log \left( \frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right)$$

$$= T_W + T_B$$

$$T_i = \sum_{j=1}^v \left( \frac{y_{ij}}{Y_i} \right) \log \left( \frac{y_{ij}/Y_i}{n_{ij}/n_i} \right)$$

$$T_W = \sum_{i=1}^u \left( \frac{Y_i}{Y} \right) T_i$$

Dan

$$T_B = \sum_{i=1}^u \left( \frac{Y_i}{Y} \right) \log \left( \frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right)$$

$I(y)$  = Indeks Entropi Theil

$y_{ij}$  = PDRB provinsi  $j$  di wilayah  $i$

$Y_i$  = jumlah PDRB perkapita di wilayah  $i$

$Y$  = Rata-rata PDRB Perkapita Indonesia

$n_{ij}$  = Jumlah penduduk provinsi  $j$  di wilayah  $i$

$n_i$  = Jumlah penduduk wilayah  $i$

$n$  = Jumlah penduduk Indonesia

$I(y): 0 \leq I(y) \leq 1$

$I(y) = 0$ , berarti ketimpangan semakin kecil (merata)

$I(y) = 1$ , berarti ketimpangan semakin besar (tidak merata)

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai Indeks Entropi Theil maka semakin merata (Umiyati, 2012). Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengetahui ketimpangan antara wilayah dan di dalam wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Pendapatan Perkapita di Wilayah Sumatera

Analisis ketimpangan dirancang untuk menangani masalah-masalah perbedaan di antar individu, namun sebagian besar indikator boleh diubah untuk analisis ketimpangan pendapatan perkapita antar wilayah. Tidak ada ukuran terbaik dari sebuah ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga beberapa indikator yang paling umum digunakan sebagai alat analisis. Indeks variasi Williamson merupakan indikator utama dan juga memperhatikan indikator Theil T sebagai indikator menguraikan ketimpangan spasial (Sirojuzilam, 2009).

Untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan (*disparity*) pendapatan perkapita antara Provinsi dengan objek penelitian yaitu Pulau Sumatera, maka digunakan rumus Indeks Williamson. Untuk menghitung Indeks Williamson maka diperlukan data PDRB dan jumlah penduduk. Setelah data tersebut diolah melalui rumus/formula yang ada maka

diperoleh nilai Indeks Williamson yaitu untuk pulau Sumatera, dari tahun 2003-2013. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Nilai Indeks Williamson Pendapatan Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2003-2013

No	Tahun	Nilai Indeks Williamson
1	2003	0.03526
2	2004	0.03658
3	2005	0.00127
4	2006	0.00137
5	2007	0.00140
6	2008	0.00133
7	2009	0.00127
8	2010	0.00134
9	2011	0.00135
10	2012	0.00140
11	2013	0.00145
Rata-rata		0.00764

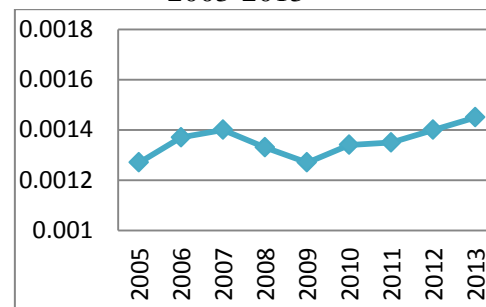
Sumber: Data olahan, 2014.

Dari tabel 1 dapat dilihat nilai Indeks Williamson (IW) Pendapatan Perkapita di Pulau Sumatera pada periode pengamatan cenderung kecil dari 1 (satu). Hal ini menunjukkan nilai IW Pendapatan Perkapita adalah tidak timpang. Nilai IW di tahun 2003 dan 2004 jauh lebih besar angkanya dibandingkan Nilai IW tahun 2005 sampai dengan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran PDRB Perkapita merata di Pulau Sumatera. Dengan rata-rata Indeks Williamson 0,00764 maka ketimpangan yang terjadi tergolong ketimpangan rendah, karena sesuai dengan kriterianya yaitu jika  $IW < 0,35$  maka ketimpangan tergolong rendah.

Grafik 1 menggambarkan dengan lebih jelas kondisi ketimpangan di Pulau Sumatera di setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun nilai IW cenderung fluktuatif dengan selisih ketimpangan yang tidak

terlalu banyak. Ditahun 2007 ke 2009 ketimpangan cenderung menurun, namun di tahun 2009 ke 2013 ketimpangan yang terjadi cenderung meningkat.

Grafik 1: Nilai Indeks Williamson Pendapatan Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2003-2013



Sumber: Data olahan, 2014.

Untuk menghitung Indeks Entropi Theil maka diperlukan data PDRB dan jumlah penduduk. Setelah data tersebut diolah melalui rumus/formula yang ada maka diperoleh nilai Indeks Entropi Theil pulau Sumatera dari tahun 2003-2013. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Indeks Entropi Theil Inter-wilayah di Pulau Sumatera Tahun 2003-2013

Tahun	Tw	Tb	T
2003	0.24180	0.16024	0.40204
2004	0.24293	0.16020	0.40313
2005	0.21735	0.15743	0.37478
2006	0.22562	0.15837	0.38399
2007	0.21931	0.15770	0.37701
2008	0.19973	0.15563	0.35536
2009	0.18926	0.15457	0.34383
2010	0.17804	0.15303	0.33107
2011	0.16908	0.15201	0.32109
2012	0.16266	0.15130	0.31396
2013	0.16218	0.15130	0.31347
Rata-Rata	0.20072	0.15562	0.35634

Sumber: Data olahan, 2014.

Angka ketimpangan inter-wilayah (Tw) lebih besar dibandingkan antar-wilayah (Tb). Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan perkapita di

Pulau Sumatera sebenarnya terjadi antar propinsi yang berada di Pulau Sumatera, bukan ke antar wilayah bagian Pulau Sumatera.

Gambar tabel 3 di peroleh dari perbandingan wilayah bagian Sumatera dengan Provinsi di Sumatera. Tabel tersebut menggambarkan bahwa nilai Indeks Entropi Theil di Pulau Sumatera terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu 0,08296 dan terkecil pada tahun 2013 sebesar 0,08092. Nilai Indeks Entropi Theil inter-wilayah (Tw) terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan nilai 0,00380 pada tahun 2013 dengan nilai 0,00240 merupakan indeks Entropi Theil terkecil. Nilai Indeks Entropi Theil antar-wilayah (Tb) terbesar terjadi pada tahun 2003 dan 2004 dengan nilai 0,07939 dan yang terkecil terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dengan nilai 0,07852.

Tabel 3: Indeks Entropi Theil Antar Wilayah Bagian di Pulau Sumatera

Tahun	Tw	Tb	T
2003	0.00331	0.07939	0.08270
2004	0.00338	0.07939	0.08277
2005	0.00380	0.07916	0.08296
2006	0.00371	0.07924	0.08295
2007	0.00334	0.07919	0.08252
2008	0.00330	0.07899	0.08230
2009	0.00309	0.07889	0.08197
2010	0.00293	0.07872	0.08166
2011	0.00276	0.07861	0.08136
2012	0.00259	0.07852	0.08111
2013	0.00240	0.07852	0.08092
Rata-Rata	0.00315	0.07897	0.08211

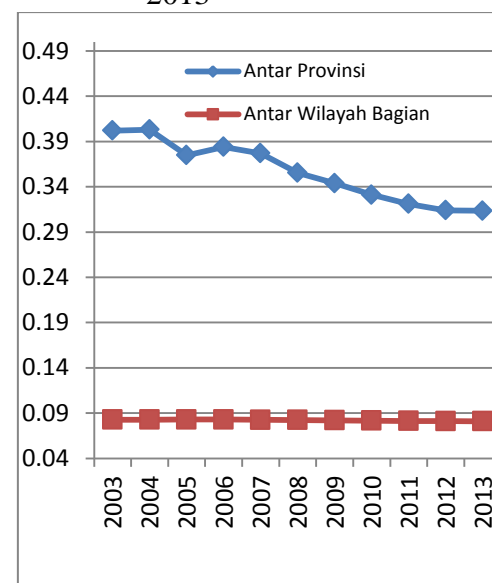
Sumber: Data olahan, 2014.

Jika di lihat dari tabel di atas, nilai Entropi Theil antar provinsi lebih besar dengan rata-rata 0,35634 di bandingkan dengan nilai Entropi Theil antar wilayah bagian dengan rata-rata yaitu 0,08211.

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan dari tahun 2003 sampai

2013 ketimpangan yang terjadi yaitu antar 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sedangkan bila Pulau Sumatera di bagi menjadi 3 wilayah bagian, ketimpangan tidak begitu terlihat, walaupun di dalam wilayah bagian Sumbagut hanya ada 2 provinsi. Jadi walaupun di wilayah sumbagut hanya ada 2 Provinsi sedangkan di wilayah Sumbagteng dan Sumbagsel ada 4 provinsi, tapi sumbagut tetap bisa bersaing dengan wilayah lainnya dari segi PDRB perkapita.

Grafik 2: Nilai Indeks Entropi Theil Pendapatan Perkapita Inter Provinsi dan Antar Wilayah di Pulau Sumatera Tahun 2003-2013



Sumber: Data olahan, 2014

### Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan Perkapita di Pulau Sumatera

Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, ini karena beragamnya karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah

dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Sebagai akibatnya akan timbul perbedaan kesejahteraan di berbagai daerah.

Dalam Nurhuda dkk (2013), Mopanga melakukan penelitian Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur signifikan sebagai sumber utama ketimpangan. Lebih lanjut secara deskriptif, Mopanga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan (Indeks Gini). Artinya secara vertikal pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan.

Dalam Sirojuzilam (2009) banyak pakar mengatakan adanya *trade off* diantara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Fei dan Rains (1964), Kuznets (1966), Adelman dan Moris (1973), menyatakan bahwa disparitas atau ketimpangan pendapatan ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang diindikasikan oleh luas wilayah (negara), sumber daya alam dan kebijakan yang di laksanakan. Dari pendapat di atas, maka pada kesempatan ini akan dikemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah sebagai berikut :

- a. Transportasi
- b. Indeks Pembangunan Manusia
- c. Penduduk
- d. Investasi

Banyaknya masalah yang timbul disuatu wilayah tentu dipicu oleh faktor-faktor tertentu.

Begitupun adanya perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan mempengaruhi nilai pendapatan di daerah tersebut. Sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antar Provinsi di Sumatera yang menyebabkan terjadi ketimpangan sebagai berikut.

Sarana transportasi yang tersedia di tiap-tiap Provinsi yang ada di Sumatera. Provinsi Sumatera Utara memiliki panjang jalan terbesar dari Provinsi lainnya yaitu sebesar 39.240,91 km<sup>2</sup>. Lalu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pelabuhan terbanyak dari Provinsi lainnya yaitu sebanyak 17 pelabuhan, ini sesuai dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang lebih banyak perairan dari pada daratan. Kemudian selanjutnya Provinsi Aceh memiliki jumlah bandara terbanyak dari pada Provinsi lainnya yaitu sebanyak 12 Bandara.

Adanya perbedaan angka Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi di Sumatera. Provinsi Riau memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 76,90, diikuti dengan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 76,20 dan Provinsi Lampung memiliki IPM yang terendah yaitu 72,45.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 227 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Provinsi Jambi memiliki kepadatan penduduk terendah sebesar 67 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah akan berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat dan kemiskinan. Hal ini juga telah dibuktikan dengan tingginya jumlah pengangguran di



Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 204 ribu jiwa.

Pada tahun 2012 Provinsi Riau mendapatkan investasi tertinggi baik dari Investasi PMDN 5.450,40 miliar maupun investasi PMA sebesar 1.152,90 miliar. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memperoleh investasi PMDN terendah 45,5 miliar dan provinsi Bengkulu hanya memperoleh 30,4 miliar dari investasi PMA.

Sebagian besar daerah yang ada di wilayah Sumatera adalah kawasan industri dan perdagangan sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Hal ini membuka kesempatan kerja yang lebih besar di daerah yang mendapatkan investasi sehingga menyerap angkatan kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian dalam penelitian yang dilakukan mengenai ketimpangan pendapatan perkapita antar Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2003-2013 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Williamson, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan perkapita di Pulau Sumatera pada tahun 2003-2013. Ketimpangan pendapatan perkapita yang terjadi tergolong ketimpangan rendah.
2. Hasil analisis yang menggunakan Indeks Entropi Theil, menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Pulau Sumatera yaitu ketimpangan antar Provinsi di Pulau Sumatera. Hipotesis Kurva U terbalik yang

dikemukakan Kuznet tidak terbukti baik menggunakan Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil di Pulau Sumatera.

3. Adanya perbedaan sarana transportasi, tingkat IPM, penduduk dan alokasi investasi di tiap-tiap Provinsi merupakan faktor penyebab dari ketimpangan pendapatan perkapita yang terjadi di Pulau Sumatera.

## SARAN

Dengan melihat hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Dari hasil teoritis yang diperoleh dapat diterapkan bagi akademisi dan masyarakat sekitar wilayah agar lebih dapat memahami dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada masing-masing daerahnya.
2. Pemerintah daerah sangatlah mengerti dan mengetahui akan daerahnya sendiri, daerah mempunyai kepentingan dan daya tarik yang berbeda-beda, sehingga dalam upaya perencanaan pembangunan wilayah sangat penting diperhatikan pendayagunaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas terhadap ruang wilayah. Hal inilah kemudian daerah harus didorong untuk melakukan cross border spatial cooperation (kerjasama antar wilayah) dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan efek dari pengaruh wilayah batas (*regional spillover*). Pilihan

- terhadap perencanaan spatial cukup tepat dirasakan karena sebagai salah satu alternatif pendekatan perencanaan bagi daerah, sehingga menghasilkan pendekatan perencanaan pembangunan yang terbaik bagi daerah.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik ketimpangan pendapatan perkapita, kiranya dapat lebih melengkapi data-data yang kurang dan lebih mengoptimalkan faktor-faktor penyebab ketimpangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Makassar.
- Apriliani, N.K.D.S dan I.K.G. Bandesa, 2013. Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Pariwisata, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.2 (4) hal 208-215.
- Damiana dan Sirojuzilam, 2013. Potensi Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.1 (3) hal 134-150.
- Gama, A.S., 2007. Diparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* Vol.2 (1) hal 38-48.
- Kuliah Umum Pascasarjana Universitas Riau Prof. Dr. Lic.rer.reg.Sirojuzilam Hasyim Achmad, SE, 2014.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jogjakarta, Gelora Aksara Pratama.
- Mardiana dan S. Basri, 2012. Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi* Vol.20 (4) hal 1-18.
- Nurhuda, R., M.R.K. Muluk dan W.Y. Prasetyo, 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 (4) hal. 110-119.
- Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Lic.rer.reg. Sirojuzilam Hasyim Achmad, SE, 2009. Disparitas Ekonomi Regional dan Perencanaan Wilayah.
- Rizal, A., 2013. Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (studi kasus Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Akuatika* Vol. 4 (2) hal 115-130.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang-Sumatera Barat, Baduose Media.

Umiyati, E., 2012. Analisis  
Pertumbuhan Ekonomi dan  
Ketimpangan Pembangunan  
Antar Wilayah Di Pulau  
Sumatera. *Jurnal Paradigma  
Ekonomika* Vol 1(6), hal 42-  
50.

Yeniwati, 2013. Ketimpangan  
Ekonomi Antar Provinsi Di  
Sumatra. *Jurnal Kajian  
Ekonomi* Vol 2 (3) hal 1-20.